E Ibrahim, Ratna Indraswari
E Danarto

PUSAT DOKUMENTASI SASTRA H.B. JASSIN
Surabaya: Surabaya Post
Tahun: 48 Nomor: 167
Jumat, 23 Juni 2000
Halaman: 14 Kolom: 3--5

Sastrawan Negara Dibahas di Unibraw

Malang - Surabaya Post

Perlu tidaknya kehadiran sastrawan negara, dibahas dalam diskusi umum di Universitas Brawijaya (Unibraw), Rabu (21/6). Kegiatan yang dilakukan di sela acara pendaftaran UMPTN itu menghadirkan Dr Djoko Saryono MPd, dosen sastra dari Universitas Negeri Malang (UM), dan cerpenis Ratna Indraswari Ibrahim.

Menurut Doktor Djoko, perlu tidaknya sastrawan negara di Indonesia, merupakan pertanyaan yang harus dijawab secara hati-hati. Posisi dan fungsi sastrawan negara harus diketahui dulu.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah sastrawan negara merupakan institusi atau himpunan sastrawan yang "dihidupi" oleh negara atau tidak. 14 3.5

Pertanyaan berikutnya, apakah sastrawan negara merupakan individu yang bebas atau terikat kepentingan negara.

"Pada masa lalu, hampir semua kerajaan di Indonesia memiliki sastrawan negara sebagai institusi negara dan sebagai himpunan individu sekaligus," jelasnya.

Mengenai kedudukan sastrawan negara, menurut dosen Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UM itu, ada dua kemungkinan yang muncul. Pertama, sastrawan negara sebagai institusi dan individu yang bebas dan independen dari peraturan dan kepentingan negara.

"Mereka tidak melayani kepentingan negara tapi hanya melayani kepentingan kreatif dengan berasaskan kebenaran, kejujuran, dan keadilan," papar Doktor Djoko.

Kemungkinan kedua, sastrawan negara hanya melayani kepentingan negara. Pada masa lalu, hampir semua sastrawan negara hanya melayani kepentingan negara.

Metafora Imaji

Sementara Ratna Indraswari berpendapat, usulan sastrawan negara seperti pernah dilontarkan salah seorang cerpenis Indonesia, Danarto, perlu dimulai dari unit terkecil. Misalnya, "membangun" sastrawan negara diawali dari lembaga pemerintah, non pemerintah, keluarga, serta sekolah.

Di unit-unit itulah dimulainya keinginan dan kesadaran bahwa sebaiknya masyarakat membentuk tradisi berpikir, berfilsafat, dan bernegara.

Tanpa membangun hal-hal tersebut, adanya sastrawan negara hanya ada di luar realitas masyarakat yang berseberangan dengan masyarakat itu sendiri.

"Hakikat menikmati atau membaca karya sastra bukan hanya melihat budaya bangsa saat itu, tapi kita juga menikmati metafora imaji yang ada di setiap sastra lisan maupun tulisan," tambahnya.

Budaya yang lebih tinggi, lanjut Ratna, akan sangat mempengaruhi budaya lainnya. Contohnya, jika tahun 1960-an masyarakat Indonesia hanya mengenal sastra dari Barat, maka kini sebagian masyarakat sudah akrab dengan sastra Jepang yang antara lain ditampilkan lewat komik untuk anak-anak. **(dia)**